



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2016 - 2021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	36
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	39
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	43
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara ..	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	59
Bab IV Tujuan dan Sasaran	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	61
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	63
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	63
Bab VI Rancangan Program dan Kegiatan serta Pendanaan	65
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	69
Bab VIII Penutup	70
Lampiran :	
- Tabel 6.1	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021.

Sejalan dengan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, maka untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang selaras dengan karakteristik Kabupaten Nunukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis, tentunya bukan hanya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melainkan perlunya peran dan dukungan dari seluruh Stakeholders untuk mewujudkan hal tersebut.

Tanpa mengurangi makna yang tersaji, maka kami berupaya menampilkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 yang menggambarkan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Program / Kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan tersebut, dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021.

Demikian, mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis perubahan ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik guna tercapainya sasaran Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan.

Nunukan, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan,



Abdi Jauhari, N. ST

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19780430 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.

Sistem transportasi di Kabupaten Nunukan harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi serta mendukung pengembangan wilayah.

Dalam pengembangan transportasi, Pemerintah Daerah mempunyai peranan sebagai Pembina sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan sistem transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang.

Penyedia jasa transportasi mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung oleh perangkat dan sumber daya manusia. Ditinjau dari subyek yang menyelenggarakan transportasi, penyediaan jasa transportasi dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi maupun penyediaan jasa transportasi untuk kepentingan sendiri yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya.

Hasil pembangunan transportasi yang mampu menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi dengan jaringan transportasi yang semakin berkembang, perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Setelah memasuki era reformasi, kebijakan dan strategi pembangunan di daerah mengalami perkembangan dalam suatu lingkungan administrasi pemerintahan yang didesentralisasikan. Daerah harus memperbaiki cara merencanakan dan membangun sarana prasarana transportasi agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, lebih bertanggungjawab dan mengikut sertakan seluruh unsur masyarakat yang terlibat. Perubahan cara pikir merupakan suatu pergeseran yang sangat penting dalam pembangunan di daerah, tidak sekedar ditujukan pada perbaikan fisik prasarana dan sarana yang ada.

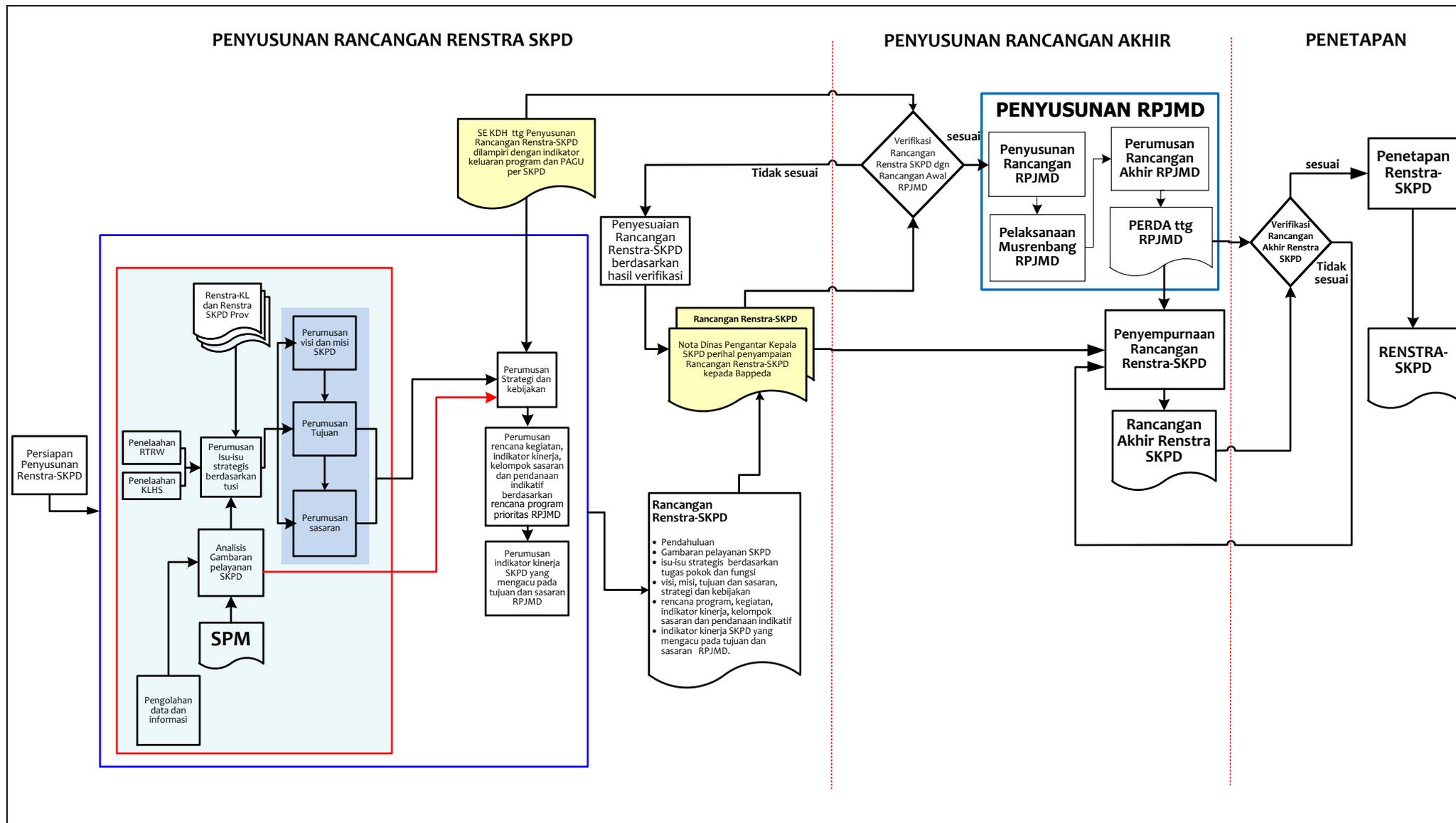
Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal untuk melayani penduduk setempat, juga berkembang pula kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan. Seiring perkembangan pembangunan yang semakin pesat diiringi jumlah penduduk yang terus meningkat, untuk mengatasinya membutuhkan sarana umum yang memadai termasuk atas sarana prasarana Perhubungan.

Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang sampai saat ini masih terus berkembang dalam hal pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya melakukan percepatan di berbagai program dan kegiatan pembangunan, khususnya di bidang transportasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perubahan ini digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan sektor perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Nunukan dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Renstra Perubahan Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan sistem pelayanan sektor perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan pada Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagai acuan dan alat ukur perencanaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

Renstra disusun sebagaimana bagan alir sebagai berikut :



Renstra perubahan Dinas Perhubungan memuat : tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

Renstra perubahan Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2016-2021 dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021 dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Renstra perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2016-2021 juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Renstra perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2016-2021 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Perhubungan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renstra perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaah hasil evaluasi Renstra PD periode 2011 - 2016, dan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan tahun 2013 – 2033.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan **Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2016 – 2021** yaitu : **Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera.**

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
20. Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036;
21. Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
22. Perda Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025;
23. Perda Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Nunukan 2013 – 2033;
24. Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021;
25. Perda Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
26. Perda Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan Tujuan. Renstra perubahan disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021 secara nyata kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan disektor Perhubungan yang efektif dan efisien.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016–2021 secara sistematika tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
- 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kepelabuhanan dan penerbangan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang angkutan pelayaran;
- f. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Bidang Perhubungan Perairan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - 2) Seksi Angkutan Perairan.
- e. Bidang Prasarana Perhubungan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan; dan
 - 2) Seksi Prasarana Perhubungan Perairan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat

✓ Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang darat;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan perairan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan;
- g. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓ **Sekretariat**

Tugas :

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- c. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

✓ **Bidang Perhubungan Darat**

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang perhubungan darat;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang perhubungan darat;
- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan darat; dan
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

✓ **Bidang Perhubungan Perairan**

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang perhubungan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang perhubungan perairan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang perhubungan perairan;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang perhubungan perairan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang angkutan perairan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan perairan; dan
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

✓ **Bidang Prasarana Perhubungan**

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang prasarana perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang prasarana perhubungan;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang prasarana perhubungan;
- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang prasarana perhubungan darat dan penerbangan;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang prasarana perhubungan perairan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang prasarana perhubungan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2016
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
1	SD	1	0	1	1.22
2	SMP	0	0	0	0.00
3	SMA	30	1	31	36.59
4	D1	0	0	0	0.00
5	D2	0	0	0	0.00
6	D3	21	0	21	25.61
7	D4/S1	27	2	29	35.37
8	S2	1	0	1	1.22
Jumlah		80	3	83	100

Tabel. 2.2
Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2016
Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
1	I a	1	0	1	1.22
2	I b	0	0	0	0.00
3	I c	0	0	0	0.00
4	I d	0	0	0	0.00
5	II a	7	1	8	8.54
6	II b	10	0	10	12.20
7	II c	10	0	10	12.20
8	II d	18	0	18	21.95
9	III a	11	2	13	15.85
10	III b	8	0	8	9.76
11	III c	9	0	9	10.98
12	III d	2	0	2	2.44
13	IV a	2	0	2	2.44

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
14	IV b	1	0	1	1.22
15	IV c	1	0	1	1.22
16	IV d	0	0	0	0.00
Jumlah		80	3	83	100.00
Non PNS/ Honoror				222	

Tabel. 2.3
Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2016
Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah PNS
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasi/ Kasubag	16
5.	Kasubag di UPT	3
6.	Jabatan Fungsional	0
Jumlah		24

Tabel. 2.4
Jumlah PNS/ CPNS yang memiliki latar belakang pendidikan/ keahlian
teknis yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

No.	Pendidikan/ Keahlian	Jumlah
1.	S1/D4 Manajemen Kepelabuhanan/ Transportasi	7
2.	S1 Teknik Perkapalan	3
3.	S1 Teknik Sipil	3
4.	S1 Teknik Mesin	1
5.	D3 Pelayaran/ ASDP	16
6.	D3 Teknik Mesin/ Otomotif	3
7.	SMK Teknik Mesin/ Otomotif	4
Jumlah		37

Dari tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebanyak 37 dari 83 PNS/ CPNS Dinas Perhubungan (44 %) memiliki latar belakang pendidikan/ keahlian teknis yang cukup dalam melaksanakan tugas.

SUMBER DAYA MODAL / ASET BERUPA SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, bangunan prasarana perhubungan (dermaga, terminal, bandara, dsb) dan sarana mobilitas serta sarana lainnya yang dioptimalkan penggunaannya. Berikut daftar sarana dan prasarana tersebut :

Tabel. 2.5
Daftar Sarana Dinas Perhubungan Tahun 2016

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Dump Truck	1	unit	rusak
2	Portable Generating Set	1	unit	rusak
3	Transportable Water Pomp	1	unit	baik
4	Portable Water Pump	3	unit	baik
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	unit	baik
6	Pick Up	4	unit	25% baik
7	Sepeda Motor	9	unit	75% baik
8	Gerobak Dorong	18	buah	30% baik
9	Kapal Motor	1	unit	rusak
10	Speed Boat	3	unit	baik
11	Motor Boat	1	unit	rusak
12	Mesin Press	1	unit	rusak
13	Mesin Kompresor	1	unit	baik
14	Tabung NH3	13	unit	baik
15	Bak Air	12	buah	50% baik
16	Mekanikal dan Elektrikal	1	unit	baik

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
17	Tool Kit Set	1	buah	baik
18	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	3	buah	rusak
19	Global Positioning System	6	unit	50% baik
20	Grating Generator Unit	2	unit	baik
21	Hardnest Tester	1	unit	rusak
22	Timbangan	1	unit	rusak
23	Lemari Penyimpanan	2	buah	baik
24	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	unit	baik
25	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	8	unit	rusak
26	Mesin Ketik Manual Longewagen	1	unit	rusak
27	Mesin Ketik Lain-lain	9	unit	rusak
28	Mesin Calculator	3	unit	baik
29	Rak Besi/Metal	4	buah	baik
30	Rak Kayu	5	buah	baik
31	Filling Besi/Metal	25	buah	50% baik
32	Band Kas	2	buah	50% baik
33	Lemari kayu	17	buah	75% baik
34	Papan Visuil	3	buah	rusak
35	Papan Nama Instansi	22	buah	75% baik
36	Papan Pengumuman	1	buah	rusak
37	White Board	17	buah	50% baik
38	Peta	1	buah	baik
39	Mesin Absensi	6	buah	1 rusak
40	Hand Metal Detector	7	unit	baik
41	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1,086	buah	50% baik
42	Lemari Kayu	5	buah	baik
43	Meja Kayu/Rotan	6	buah	baik
44	Kursi Besi/Metal	31	buah	50% baik
45	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	40	buah	50% baik
46	Meja Rapat	2	buah	baik
47	Meja Tulis	9	buah	baik
48	Meja Makan	12	buah	rusak

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
49	Meja Telpon	1	buah	rusak
50	Meja Tik	1	buah	rusak
51	Meja Reseption	6	buah	baik
52	Kursi Rapat	20	buah	baik
53	Kursi Tangan	26	buah	4 rusak
54	Kursi Putar	119	buah	50% rusak
55	Kursi Biasa	49	buah	10 rusak
56	Bangku Tunggu	50	buah	baik
57	Kursi Lipat	100	buah	50% rusak
58	Meja Komputer	4	buah	rusak
59	Tikar	10	buah	baik
60	Meja Biro	163	buah	10 rusak
61	Sofa	10	buah	5 rusak
62	Kursi Plastik	100	buah	baik
63	Jam Mekanis	3	unit	baik
64	Mesin Penghisap Debu	1	unit	baik
65	Mesin Potong Rumput	5	unit	baik
66	Lemari Es	3	unit	baik
67	AC Unit	11	unit	baik
68	AC Split	24	unit	4 rusak
69	Kipas Angin	33	unit	10 rusak
70	Kompore Gas	3	unit	rusak
71	Alat Dapur Lainnya	1	unit	rusak
72	Tabung Gas	3	unit	rusak
73	Radio	3	unit	rusak
74	Televisi	11	unit	7 rusak
75	Loudspeaker	2	unit	baik
76	Wireless	1	unit	rusak
77	Megaphone	2	unit	baik
78	Microphone	1	unit	baik
79	Unit Power Supply	25	unit	10 rusak
80	Lambang Garuda Pancasila	2	buah	baik

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
81	Tiang Bendera	1	buah	baik
82	Tangga Alumunium	5	buah	3 rusak
83	Dispenser	21	unit	15 rusak
84	Handy Cam	3	unit	baik
85	Alat Rumah Tangga Lain-lain	34	buah	baik
86	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1	buah	baik
87	P.C Unit	60	unit	10 rusak
88	Lap Top	22	unit	10 rusak
89	Hard Disk	6	unit	2 rusak
90	Peralatan Komputer Mainframe	2	unit	baik
91	Printer	30	unit	15 rusak
92	Server	1	unit	baik
93	Router	1	unit	baik
94	Hub	4	unit	baik
95	Modem	7	unit	2 rusak
96	Netware Interface External	1	unit	baik
97	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	buah	baik
98	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	baik
99	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	buah	baik
100	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	buah	baik
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40	buah	5 rusak
102	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	80	buah	20 rusak
103	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	31	buah	5 rusak
104	Proyektor + Attachment	2	unit	baik
105	Compact Disc. Player	2	unit	baik
106	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6	unit	baik
107	Battery Charger	2	unit	baik
108	Camera Electronic	27	unit	10 rusak
109	Slide Projector	2	unit	rusak
110	Camera Film	1	unit	rusak
111	Alat Pemanas Prosesing / Water	1	unit	rusak
112	Mesin Jilid	1	unit	baik

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
113	Alti Meter	1	unit	rusak
114	Kompas	2	buah	rusak
115	Sound System	2	buah	baik
116	Pesawat Telephone	12	buah	rusak
117	Handy Talky	90	unit	15 baik
118	Facsimile	3	unit	1 baik
119	Alat Komunikasi Lain-lain	3	unit	baik
120	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	5	unit	baik
121	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	8	unit	baik
122	Alat-alat Sandi Lain-lain	50	unit	baik
123	Antena MF/MW Portable	9	unit	baik
124	Peralatan Antena HF/SW Lain-lain	1	unit	baik
125	Antena SHF/Parabola Portable	1	unit	baik
126	Antena Tuning Unit	1	unit	baik
127	All Band Receiver	1	unit	baik
128	Sound Level Meter	1	unit	baik
129	Brake Band Tester	1	unit	baik
130	Radio Graphis Equipment	1	unit	baik
131	Power Suply	2	unit	baik
132	Food Trolley	20	unit	baik
133	Alat Pemadam Kebakaran	9	buah	baik
134	Radio Activity	1	unit	baik
135	Meja Kerja	34	buah	baik
136	Kabel Listrik	1	buah	baik
137	Bendera Merah Putih	2	buah	baik
138	Gambar Presiden	1	buah	baik
139	Vehicle Emission Gas analyzer	1	unit	baik
140	Teropong	2	buah	rusak

Tabel. 2.6
Daftar Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2018

No	Nama Bangunan	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	unit	baik
2.	Gedung UPT Kecamatan	1	unit	rusak
3.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1	unit	baik
4.	Gudang	1	unit	baik
5.	Tempat Parkir Mobil	1	unit	baik
6.	Pelabuhan/ Dermaga	20	unit	5 rusak
7.	Rumah Pengawas Keselamatan Pelayaran	3	unit	rusak
8.	Kios	1	unit	baik
9.	Terminal Angkutan Darat	2	unit	rusak
10.	Gedung Bandara	5	unit	baik
11.	Gedung VIP Bandara	1	unit	baik
12.	Halte	10	unit	rusak
13.	Traffic Light	3	unit	1 rusak
14.	Rambu Jalan (termasuk RPPJ)	664	unit	10% rusak

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016, dapat diketahui tingkat capaian kinerja Dishubkominfo sampai dengan T.A 2015 yang diukur melalui berbagai indikator tersebut di bawah ini :

Tabel. 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan TA 2012-2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (2014)	Target IKK (2015)	Target Indikator Lainnya (2015)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50 %			30%	40%	50%	55%	55%	50%	50%	50%	50%	50%	166 %	125 %	100 %	90,9 1%	90,9 1%
2	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100 %			90%	90%	100 %	100 %	100%	66,67%	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	74,0 8%	74,0 8%	66,6 7%	66,6 7%	66,6 7%
3	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40 %			30%	30%	40%	40%	40%	66,67%	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	222 %	222 %	166, 67%	166, 67%	166, 67%
4	Tersedianya uang lembur, uang makan dan tunjangan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab			ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Terselenggaranya e-office yang didukung fasilitas (hardware) dan aplikasi (software)			ada	penda daan sistem dan aplikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6	Laporan Keuangan Tahunan disampaikan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi			ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Tersedianya tarif pelayanan publik dan jumlah pendapatan realtime yang dapat diakses publik			100 %	50%	100 %	100 %	100 %	100%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	50%	50%	50%	50%
8	Tersedianya SPM dan SOP pada unit pelayanan publik			7	2	5	5	7	7	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
9	Jumlah arus penumpang angkutan umum			2.373.117	1.782.958	1.961.254	2.157.379	2.373.117	592.976	650.872	689.522	598.429	598.429	33,26%	33,19%	31,96%	25,22%	25,22%	
10	Rasio ijin trayek			0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,005	0,005	0,005	0,0054	0,0054	8,77 %	8,77 %	8,77 %	9,47 %	9,47 %	
11	Angkutan darat			0,072	0,083	0,079	0,075	0,072	0,064	0,065	0,065	0,065	0,065	77,11%	82,28%	86,67%	90,28%	90,28%	
12	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum			2373117	1.782.958	1.961.254	2.157.379	2.373.117	592.976	650.872	689.522	598.429	598.429	33,26%	33,19%	31,96%	25,22%	25,22%	
13	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum			3536646	2.657.135	2.922.848	3.215.133	3.536.646	855.276	856.000	898.260	1.906.694	1.906.694	32,19%	29,29%	27,94%	53,91%	53,91%	
14	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun		2.373.117	1.782.958	1.961.254	2.157.379	2.373.117	592.976	650.872	689.522	598.429	598.429	33,26%	33,19%	31,96%	25,22%	25,22%		
15	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
16	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum			85500	85.500	85.500	85.500	85.500	85500	85500	85500	85500	85500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

17	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	60 %			50%	50%	60%	60%	60%	54%	54%	54 %	54%	54%	108 %	108 %	90%	90%	90%
18	Jumlah pelabuhan laut/ sungai/ darat/ terminal yg berada dalam pengawasan		18		14	15	16	18	18	13	13	13	13	13	92,8 6%	86,6 7%	81,2 5%	72,2 2%	72,2 2%
19	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	60 %			50%	50%	60%	60%	60%	50%	50%	50%	50%	50%	100 %	100 %	83,3 3%	83,3 3%	83,3 3%
20	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	60 %			50%	50%	60%	60%	60%	55%	62%	64 %	64,29 %	64,29 %	110 %	124 %	106, 67%	107, 15%	107, 15%
21	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	75 %			75%	75%	75%	75%	75%	71,54%	71,54 %	71,54 %	71,54 %	71,54 %	95%	95%	95,3 9%	95,3 9%	95,3 9%

22	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	60 %			60%	60%	60%	60%	60%	63,78%	63,78 %	63,78 %	63,78 %	63,78 %	106 %	106 %	106,30%	106,30%	106,30%
23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90 %			90%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	90 %	63,78 %	63,78 %	100 %	100 %	100,00%	67,14%	67,14%
24	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau	50 %			45%	50%	50%	70%	70%	43,18%	43,18 %	43,18 %	43,18 %	43,18 %	96%	86%	86,36%	61,69%	61,69%
25	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50 %			45%	50%	50%	70%	70%	43,83%	43,83 %	43,83 %	43,83 %	43,83 %	97%	88%	87,66%	62,61%	62,61%
26	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai Kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100 %			80%	90%	100 %	100 %	100%	43,83%	43,83 %	43,83 %	43,83 %	43,83 %	55%	49%	43,83%	43,83%	43,83%

27	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100 %			80%	90%	100 %	100 %	100%	94,91%	94,91 %	94,91 %	100%	100%	119 %	105 %	94,9 1%	100, 00%	100, 00%
28	Jumlah moda transportasi yang telah terstandarisasi (memiliki ijin operasi)		1165		1098	1125	1148	1165	1165	884	884	884	884	884	81%	79%	77,0 0%	75,8 8%	75,8 8%
29	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100 %			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	30%	70%	70 %	70%	70%	30%	70%	70,0 0%	70,0 0%	70,0 0%
30	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota	100 %			80%	90%	100 %	100 %	100%	71,54%	71,54 %	71, 54%	71.54 %	71.54 %	89%	79%	71,5 4%	71,5 4%	71,5 4%
31	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100 %			80%	90%	100 %	100 %	100%	63,78%	63,78 %	63,78 %	63,78 %	63,78 %	80%	71%	63,7 8%	63,7 8%	63,7 8%
32	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	100 %			80%	90%	100 %	100 %	100%	63,78%	63,78 %	63,78 %	63,78 %	63,78 %	80%	71%	63,7 8%	63,7 8%	63,7 8%
33	Jumlah uji KIR angkutan umum			668	668	668	668	668	668	630	634	634	821	821	94%	95%	94,9 1%	122, 90%	122, 90%
34	Kepemilikan KIR angkutan umum			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	94,91%	94,91 %	94,91 %	100%	100%	95%	95%	94,9 1%	100 %	100 %
35	Pemasangan rambu-rambu			9 %	17%	14%	11%	9%	9%	15%	15%	11 %	0%	0%	88%	107 %	100 %	0%	0%

36	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	60 %			20%	40%	60%	70%	70%	50%	50%	60 %	70%	70%	250 %	125 %	100,00%	100 %	100 %
37	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100 %			20%	50%	100 %	100 %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
38	Jumlah bandara dan lapter			4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	250 %	250 %	250,00%	250 %	250 %
39	Total panjang runway (meter)			3565	2765	3165	3165	3565	3565	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	259 %	227 %	226,70%	201,26%	201,26%
40	Tersedianya perubahan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Tentang DLKr/DLKP Pelabuhan Nunukan yang mengakomodasi kepentingan Pemkab Nunukan dalam urusan kepelabuhanan			evaluasi	tidak ada	tidak ada	eval uasi	eval uasi	evalu asi	tidak ada	100 %	100 %	0%	0%	0%				
41	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan wilayah telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60 %			60%	60%	60%	70%	70%	50%	50%	50 %	50%	50%	83%	83%	83,33%	71,43%	71,43%

42	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40 %			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
43	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	40 %			75%	75%	75%	75%	75%	71,54%	71,54 %	71,54 %	71,54 %	71,54 %	95%	95%	95,3 9%	95,3 9%	95,3 9%
44	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100 %			60%	60%	60%	60%	60%	63,78%	63,78 %	63,78 %	63,78 %	63,78 %	106 %	106 %	106, 30%	106, 30%	106, 30%
45	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100 %			90%	90%	90%	95%	95%	63,78%	63,78 %	63,78 %	63,78 %	63,78 %	71%	71%	70,8 7%	67,1 4%	67,1 4%

46	Tersedianya kapal penyeberangan/ferry yang beroperasi pada lintas antar provinsi dan antar negara			evaluasi	tidak ada	tidak ada	studi kelengkapan	evaluasi	evaluasi	tidak ada	100 %	100 %	0%	0%	0%				
47	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75 %			75%	75%	75%	80%	80%	43,75%	43,75 %	43,75 %	43,75 %	43,75 %	58%	58%	58,33%	54,69%	54,69%
48	Tersedianya sistem pengelolaan bandara sisi darat yang melibatkan Pemkab Nunukan			evaluasi	tidak ada	tidak ada	studi kelengkapan	evaluasi	evaluasi	tidak ada	100 %	100 %	0%	0%	0%				
49	Tersedianya unit PKB bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60 %			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.7a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan T.A 2016-2021
Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase desa yang dapat diakses dengan moda transportasi yang layak	-	-	-	-	-	20,00 %	22,86 %	25,71 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Desa tertinggal yang memiliki prasarana transportasi	-	-	-	-	-	9,71 %	12,00 %	14,29 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Kecamatan perbatasan yang memiliki prasarana transportasi	-	-	-	-	-	40,00 %	53,33 %	66,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prosentase ketersediaan pelabuhan Laut, Sungai dan terminal	-	-	-	80,00 %	80,00 %	evaluasi	evaluasi	evaluasi	91,30 %	95,65 %	-	-	-	114%	120%	-	-	-
5	Prosentase Angkutan darat dan laut yang layak	-	-	-	75,00 %	75,00 %	evaluasi	evaluasi	evaluasi	75,00 %	75,00 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-
6	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	-	-	-	98,00 %	98,00 %	evaluasi	evaluasi	evaluasi	103,00 %	103,00 %	-	-	-	105%	105%	-	-	-
7	Prosentase SDM sesuai kebutuhan tugas	-	-	-	50,00 %	60,00 %	evaluasi	evaluasi	evaluasi	50,00 %	57,00 %	-	-	-	100%	95%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Persentase Perda dan Perbub yang mendukung pelayanan transportasi	-	-	-	-	-	53,95 %	76,97 %	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	-	-	-	83,05 %	84,25 %	85,45 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum	-	-	-	-	-	0,000 7	0,001 4	0,002 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase Pemasangan Rambu	-	-	-	-	-	84,00 %	89,00 %	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari 49 indikator kinerja pelayanan Dishubkominfo Kabupaten Nunukan TA 2011-2015 dapat disampaikan bahwa :

- ✓ Terdapat 16 indikator (32,65%) dengan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100%);
- ✓ Terdapat 12 indikator (24,49%) dengan capaian hampir mendekati target yang telah ditetapkan (antara 70% - 99%);
- ✓ Terdapat 11 indikator (22,45%) dengan capaian kurang dari target yang telah ditetapkan antara 50% - 69%); dan
- ✓ Terdapat 10 indikator (20,41%) dengan capaian sangat kurang dari target yang telah ditetapkan (<49%).

Kondisi ini menggambarkan bahwa perlunya evaluasi atas kinerja pelayanan Dishubkominfo TA 2011-2015 bila dinilai dari indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Dishubkominfo Tahun 2011-2016.

Selain evaluasi atas kinerja tersebut diatas, perlu juga dilakukan evaluasi atas penyusunan indikator kinerja pelayanan yang dirasa kurang mewakili dan menggambarkan kinerja Dishubkominfo yang sesungguhnya. Evaluasi tersebut terutama perlu dilakukan pada indikator – indikator non indikator SPM dan non indikator IKK.

Tabel. 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan TA 2011-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PENDAPATAN DAERAH	334.514.000,00	350.335.000,00	205.000.000,00	832.129.000,00	832.129.000,00	284.649.500,00	239.488.000,00	234.561.000,00	527.099.500,00	527.099.500,00	85,09 %	68,36 %	114,42 %	63,34 %	63,34 %	109.688.800,00	(8.731.200,00)
Pendapatan Asli Daerah	327.485.000,00	350.335.000,00	205.000.000,00	832.129.000,00	832.129.000,00	277.039.500,00	239.488.000,00	234.561.000,00	527.099.500,00	527.099.500,00	84,60 %	68,36 %	114,42 %	63,34 %	63,34 %	109.688.800,00	13.820.100,00
- Hasil retribusi daerah	327.485.000,00	350.335.000,00	205.000.000,00	832.129.000,00	832.129.000,00	277.039.500,00	239.488.000,00	234.561.000,00	527.099.500,00	527.099.500,00	84,60 %	68,36 %	114,42 %	63,34 %	63,34 %	109.688.800,00	13.820.100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.029.000,00					7.610.000,00					108,27 %					0,00	(22.551.300,00)
BELANJA DAERAH	28.924.570.023,60	20.457.121.265,10	26.586.893.622,20	31.136.093.255,00	31.136.093.255,00	21.058.708.526,29	14.839.422.033,20	18.299.381.120,93	27.837.184.827,00	27.837.184.827,00	72,81 %	72,54 %	68,83 %	89,40 %	89,40 %	3.131.740.931,56	3.373.961.605,32
Belanja tidak langsung	6.536.309.233,60	5.925.236.615,10	6.539.822.698,20	7.096.883.955,00	7.096.883.955,00	4.536.825.736,00	4.859.354.801,00	6.209.430.749,00	6.666.960.081,00	6.666.960.081,00	69,41 %	82,01 %	94,95 %	93,94 %	93,94 %	553.084.282,76	519.304.929,00
- Belanja Pegawai	6.536.309.233,60	5.925.236.615,10	6.539.822.698,20	7.096.883.955,00	7.096.883.955,00	4.536.825.736	4.859.354.801,00	6.209.430.749,00	6.666.960.081,00	6.666.960.081,00	69,41 %	82,01 %	94,95 %	93,94 %	93,94 %	553.084.282,76	519.304.929,00
Belanja langsung	22.388.260.790,00	14.531.884.650,00	20.047.070.924,00	24.039.209.300,00	24.039.209.300,00	16.521.882.790,29	9.980.067.232,20	12.089.950.371,93	21.170.224.746,00	21.170.224.746,00	73,80 %	68,68 %	60,31 %	88,07 %	88,07 %	2.578.656.648,80	2.854.656.676,32
- Belanja pegawai	4.630.662.500,00	4.845.000.000,00	6.268.222.000,00	5.606.511.500,00	5.606.511.500,00	3.992.476.414,00	3.598.154.000,00	4.847.819.000,00	4.888.768.875,00	4.888.768.875,00	86,22 %	74,27 %	77,34 %	87,20 %	87,20 %	559.774.800,00	534.030.075,00
- Belanja barang dan jasa	6.220.616.965,00	5.629.539.450,00	4.251.112.125,00	3.299.520.700,00	3.299.520.700,00	4.717.735.308,80	4.738.453.990,20	3.401.294.733,00	2.613.295.802,00	2.613.295.802,00	75,84 %	84,17 %	80,01 %	79,20 %	79,20 %	54.996.934,80	111.888.254,52
- Belanja modal	11.536.981.325,00	4.057.345.200,00	9.527.736.799,00	15.133.177.100,00	15.133.177.100,00	7.811.671.067,49	1.643.459.242,00	3.840.836.638,93	13.668.160.069,00	13.668.160.069,00	67,71 %	40,51 %	40,31 %	90,32 %	90,32 %	1.963.884.914,00	2.208.738.346,80

Tabel. 2.8a

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan T.A 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	1.010.430.195	1.199.103.107	4.030.500.000	-	-	1.147.708.310	1.393.807.574	-	-	-	1,14	1,16	-	-	-	136,74	21,44
Pendapatan Asli Daerah	1.010.430.195	1.199.103.107	4.030.500.000	-	-	1.147.708.310	1.393.807.574	-	-	-	1,14	1,16	-	-	-	136,74	21,44
- Hasil Retribusi Daerah	982.930.195	1.194.103.107	3.998.000.000	-	-	1.146.768.310	1.391.089.574	-	-	-	1,17	1,16	-	-	-	138,89	21,31
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.500.000	5.000.000	32.500.000	-	-	940.000	2.118.000	-	-	-	0,03	0,42	-	-	-	193,18	125,32
BELANJA DAERAH	19.948.980.847	14.900.693.096	18.947.043.362	-	-	18.648.295.222	13.672.773.068	-	-	-	0,93	0,92	-	-	-	-11,73	-26,68
Belanja Tidak Langsung	6.863.666.747	6.894.480.946	6.873.450.862	-	-	6.557.208.428	6.595.206.650	-	-	-	0,96	0,96	-	-	-	0,30	0,58
- Belanja Pegawai	6.863.666.747	6.894.480.946	6.873.450.862	-	-	6.557.208.428	6.595.206.650	-	-	-	0,96	0,96	-	-	-	0,30	0,58
Belanja Langsung	13.085.314.100	8.006.212.150	12.073.592.500	-	-	12.091.086.794	7.077.566.418	-	-	-	0,92	0,88	-	-	-	-13,41	-41,46
- Belanja Pegawai	3.713.585.000	3.986.577.000	5.087.285.947	-	-	3.567.255.000	3.643.636.000	-	-	-	0,96	0,91	-	-	-	21,16	2,14
- Belanja Barang dan Jasa	3.064.010.500	3.064.977.650	2.782.156.853	-	-	2.578.550.994	2.550.824.894	-	-	-	0,84	0,83	-	-	-	-4,58	-1,08
- Belanja Modal	6.307.718.600	954.657.500	4.204.149.700	-	-	5.945.280.800	883.105.524	-	-	-	0,94	0,93	-	-	-	85,33	-85,15

Dari Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishubkominfo Kabupaten Nunukan TA. 2011 – 2015 tersebut diatas, terlihat bahwa :

- ✓ Pada periode tahun 2011 sd 2015, rata-rata terdapat kenaikan sebesar Rp. 109.688.800,00 per tahun untuk target pendapatan daerah;
- ✓ Sebaliknya pada periode tahun 2011 sd 2015, rata-rata terdapat penurunan rata-rata sebesar Rp. 8.731.200,00 per tahun untuk realisasi pendapatan daerah;
Hal ini terjadi karena terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak dapat dipungut lagi karena dibatalkannya Perda yang menjadi dasar pemungutannya. Bahwa sejak diterbitkannya beberapa Perda terkait retribusi daerah yang berlaku sejak tahun 2014 diharapkan realisasi pendapatan daerah yang dibebankan pada Dishubkominfo dapat terus meningkat dan potensi pendapatan daerah yang baru dapat lebih dikembangkan.
- ✓ Pada periode tahun 2011 sd 2015 terjadi peningkatan anggaran belanja tidak langsung/ belanja pegawai rata-rata sebesar Rp. 553.084.282,76 per tahun;
- ✓ Pada periode tahun 2011 sd 2015 terjadi peningkatan realisasi anggaran belanja tidak langsung/ belanja pegawai rata-rata sebesar Rp. 519.304.929,00 per tahun;
- ✓ Pada periode tahun 2011 sd 2015 terjadi peningkatan anggaran belanja langsung yang terkait pelaksanaan Program/ Kegiatan rata-rata sebesar Rp. 2.578.656.648,80 per tahun;
- ✓ Pada periode tahun 2011 sd 2015 terjadi peningkatan realisasi anggaran belanja langsung yang terkait pelaksanaan Program/ Kegiatan rata-rata sebesar Rp. 2.854.656.676,32 per tahun;

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 bahwa secara garis besar Kementerian Perhubungan telah memberikan dukungan dalam pembangunan kawasan rawan bencana, wilayah perbatasan, dan terluar berupa pembangunan transportasi di kawasan rawan bencana, wilayah perbatasan dan terluar adalah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi disparitas antar kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut difokuskan pada :

- a. Tersedianya prasarana dan sarana transportasi dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai;
- b. Terjangkaunya pelayanan transportasi ke seluruh wilayah perbatasan;
- c. Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa transportasi;
- d. Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi yang dapat memberikan nilai tambah;
- e. Meningkatnya aksesibilitas angkutan udara di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Negara.

Bentuk dukungan ini akan diselaraskan dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 sehingga dapat mengakselerasi pembangunan transportasi di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara bahwa secara garis besar Dishubkominfo Provinsi Kaltara dalam melaksanakan pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Nunukan khususnya juga mempedomani Renstra Kementerian Perhubungan tersebut diatas dengan tambahan penekanan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik perhubungan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- b. Sudah ditetapkannya Dokumen Tataran Transportasi Wilayah Kalimantan Utara, sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah sektor perhubungan; dan
- c. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, bahwa penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan harus selaras dengan kebijakan dan strategi penataan ruang. Adapun kebijakan penataan ruang Kabupaten Nunukan terdiri atas :

- a. Pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agro industri;
- b. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
- c. Pemantapan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekosistem wilayah;
- d. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Mencermati kebijakan tersebut diatas, Dinas Perhubungan perlu mensinergikan arah pembangunan sektor perhubungan terutama dalam hal ini dalam menentukan letak prasarana perhubungan disamping mendasarkan dari hasil perhitungan teknis dan ekonomis. Terutama agar mendukung kebijakan penataan ruang tersebut diatas dan sangat memperhatikan lokasi prasarana perhubungan agar tidak terletak di kawasan Taman Nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam yang menjadi area terbesar di wilayah Kabupaten Nunukan.

Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan :

1. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik yang bervariasi;
2. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau;
3. Prasarana perhubungan yang banyak membutuhkan perawatan dengan biaya yang besar;
4. Proses pengadaan lahan yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama;
5. Makin meningkatnya angka kecelakaan kendaraan bermotor;
6. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan massal;
7. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan yang perlu diimbangi penanganan transportasi secara ideal dan berkesinambungan.

Peluang Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima di sektor perhubungan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Adanya kemauan para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk dapat bertransportasi secara aman dan lancar;
3. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi.
4. Bermunculan inovasi-inovasi teknologi terkait prasarana dan sarana perhubungan yang dapat menjadi pemicu pengembangan wawasan aparatur dan juga menurunkan tingginya biaya pembangunan prasarana dan tingginya biaya produksi sarana perhubungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Permasalahan disektor perhubungan di Kabupaten Nunukan ditimbulkan oleh berbagai faktor ataupun beberapa faktor yang saling berkaitan. Sebagian besar terkait rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Nunukan.

Adapun pokok-pokok permasalahan disektor perhubungan yang berhasil teridentifikasi adalah :

1. Belum cukupnya dan meratanya kompetensi SDM sektor transportasi yang berpengaruh pada performa sektor transportasi secara keseluruhan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Kebijakan rekrutmen dan penempatan SDM yang belum optimal;
 - b. Masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten untuk ditugaskan pada prasarana perhubungan yang telah tersedia / terbangun;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung diwilayah terpencil yang menghambat pelaksanaan tugas.
2. Belum tersedianya infrastruktur transportasi yang baik di seluruh wilayah kabupaten terutama diwilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Luasnya wilayah Kabupaten Nunukan dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak sungai dan dataran tinggi, sehingga sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyediaan infrastruktur transportasi yang baik;
 - b. Biaya penyediaan lahan dan status lahan yang belum jelas.
3. Belum tertatanya secara baik pengoperasian moda transportasi darat dan perairan yang disebabkan terbatasnya peraturan dan rendahnya kualitas SDM. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Usaha transportasi darat maupun perairan masih dioperasikan dengan manajemen secara tradisonal. Hal ini kurang sesuai dengan peraturan-peraturan teknis maupun operasional yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjamin terpenuhinya faktor

- keselamatan transportasi. Peraturan menuntut moda transportasi harus dioperasikan dengan badan hukum dengan manajemen profesional.
- b. Belum berjalan dengan baiknya peraturan yang sudah ada dan belum cukupnya peraturan terkait perlintasan / rute, trayek dan manajemen lalu lintas transportasi publik lainnya.
4. Rendahnya penggunaan transportasi umum. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
- a. Buruknya kondisi fisik sarana transportasi umum sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi umum menurun;
 - b. Pengelolaan manajemen jasa angkutan yang kurang profesional dan manajemen transportasi angkutan yang belum optimal. Hal ini berpengaruh pada performance sarana, biaya operasional, tarif angkutan umum dan kepuasan pengguna jasa angkutan;
 - c. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kualitas dan kuantitas SDM	Belum mencukupi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas		Masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten untuk ditugaskan pada prasarana perhubungan yang telah tersedia/ terbangun	Kebijakan rekrutmen dan penempatan SDM yang belum optimal	Belum cukupnya dan meratanya kompetensi SDM sektor transportasi yang berpengaruh pada performa sektor transportasi secara keseluruhan
			Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di wilayah terpencil yang menghambat pelaksanaan tugas		
Infrastruktur transportasi	Belum mencukupi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas			Luasnya wilayah Kabupaten Nunukan dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak sungai dan dataran tinggi	Belum tersedianya infrastruktur transportasi yang baik di seluruh wilayah kabupaten terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
				Biaya penyediaan lahan dan status lahan yang belum jelas	

Pengoperasian moda transportasi	Pengaturan dan manajemen belum profesional		Belum berjalan dengan baiknya peraturan yang sudah ada dan belum cukupnya peraturan terkait perlintasan/ rute, trayek dan manajemen lalu lintas transportasi publik lainnya.	Usaha transportasi darat maupun perairan masih dioperasikan dengan manajemen secara tradisonal	Belum tertatanya secara baik pengoperasian moda transportasi darat dan perairan yang disebabkan terbatasnya peraturan dan rendahnya kualitas SDM
Penggunaan transportasi umum	Menurun			Buruknya kondisi fisik sarana transportasi umum sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi umum menurun	Rendahnya penggunaan transportasi umum
				Pengelolaan manajemen jasa angkutan yang kurang profesional dan manajemen transportasi angkutan yang belum optimal.	
				Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.	

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 tercantum bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode Tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

Dinas Perhubungan dalam hal ini mengemban tugas dan menjalankan fungsi untuk mendukung Visi tersebut diatas melalui **Misi Pertama** yaitu **“Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan”**. Misi ini dijelaskan sebagai berikut :

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik). Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM, wirausahawan (orang), koperasi dan industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil produksi sektor agrobisnis.

Dinas Perhubungan ikut mendukung **Tujuan Pertama** dari **Misi Pertama** tersebut diatas yaitu **“Meningkatnya Perekonomian Kabupaten Nunukan”**. dengan **Sasaran “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”** dengan **Indikator Sasaran “Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi Darat dan Air”**. Hal ini dilaksanakan dengan **Strategi “melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkualitas, merata dan terintegrasi secara berkelanjutan”** Adapun **Arah Kebijakan** yang diambil adalah **“Mempercepat penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal dalam upaya memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang/jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis”** dengan **Program Prioritas** yaitu **Program “Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan”** dan **Program “Peningkatan Pelayanan Perhubungan”**.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan akan diprioritaskan untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diatas berupa :

Meningkatkan kelayakan infrastruktur disektor perhubungan berupa pembangunan, peningkatan, revitalisasi maupun rehabilitasi infrastruktur perhubungan dengan prioritas di simpul-simpul pengembangan kawasan pengembangan agrobisnis untuk mendukung percepatan pengembangan agrobisnis.

Kegiatan peningkatan kelayakan infrastruktur ini dimulai dengan kebijakan perencanaan, kebijakan kajian kelayakan, pembangunan fisik sampai dengan operasional prasarana yang telah terbangun. Dengan prioritas untuk membuka isolasi daerah perbatasan dan tertinggal serta pengawasan dan pengendalian operasional sarana transportasi umum untuk menjamin keselamatan pengguna jasa, ketersediaan moda, kemudahan akses ke jalur moda transportasi dan keterjangkauan biaya transportasi.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode Tahun 2016-2021 diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Misi 1 : Mengkakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan	Belum cukupnya dan meratanya kompetensi SDM sektor transportasi yang berpengaruh pada performa sektor transportasi secara keseluruhan	Terbatasnya kemampuan SDM Dinas Perhubungan yang memiliki kompetensi bidang konstruksi untuk melaksanakan pembangunan fisik infrastruktur	Tingginya perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di area peningkatan infrastruktur transportasi yang dapat membantu pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Belum tersedianya infrastruktur transportasi yang baik di seluruh wilayah kabupaten terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kelayakan infrastruktur sektor perhubungan	Telah tersedianya contoh/ model infrastruktur perhubungan yang telah terbangun yang telah mengadaptasi karakteristik alam maupun kebiasaan pengguna dan pelaku usaha transportasi secara baik
3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Belum tertatanya secara baik pengoperasian moda transportasi darat dan perairan yang disebabkan terbatasnya peraturan dan rendahnya kualitas SDM	Belum tersedianya arah kebijakan terkait manajemen transportasi umum di Kabupaten Nunukan berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati	Tingginya potensi peningkatan PAD dari sektor pelayanan transportasi apabila semua infrastruktur perhubungan dapat ditingkatkan secara optimal

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

3.3.1 RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan Nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Pembangunan sektor transportasi dengan skala Nasional terakomodir dalam Dokumen Tatanan Transportasi Nasional (TATRANAS) yang implementasi dan terjabarkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan RI. Peranan Renstra Kementerian Perhubungan RI merupakan landasan dan pedoman dalam mewujudkan keselarasan pembangunan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dalam tataran Lokal Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam merencanakan dan membuat program kegiatan sektor transportasi

Lokal Kabupaten Nunukan kurun 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2016-2021, berpedoman pada Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kabupaten Nunukan yang merupakan amanah dari TATRANAS, RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI dan RPJMN.

Mendasari kondisi tersebut Kementerian Perhubungan RI dengan Visinya **“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”** dengan Misinya :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tersebut, bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran pengguna jasa maupun penyedia jasa transportasi umum atas faktor keselamatan dan keamanan;
2. Masih belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi terutama diwilayah terpencil dan terisolir;

3. Masih belum optimalnya pelayanan Dinas Perhubungan karena masih berlangsungnya upaya konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan penegakan hukum secara konsisten;
4. Terbatasnya kemampuan pemilik usaha jasa transportasi untuk meremajakan dan mengoptimalkan armadanya sehingga dapat bersaing secara sehat dan ekonomis dengan moda transportasi pribadi.

Sedangkan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 antara lain :

1. Baiknya kerjasama antar stakeholder di sektor perhubungan untuk meningkatkan upaya pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi umum;
2. Tersedianya program subsidi transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi terutama di wilayah terpencil dan terisolir;

3.3.2. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021

Dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dicantumkan Tujuan sebagai berikut :

Tujuan :

“Mewujudkan Konektivitas antar Wilayah di Kalimantan Utara”.

Sasaran :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi”.

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara tersebut, bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran pengguna jasa maupun penyedia jasa transportasi umum atas faktor keselamatan dan keamanan;
2. Masih belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi terutama di wilayah terpencil dan terisolir;
3. Masih belum optimalnya pelayanan Dinas Perhubungan karena masih berlangsungnya upaya konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan penegakan hukum secara konsisten;
4. Terbatasnya kemampuan pemilik usaha jasa transportasi untuk meremajakan dan mengoptimalkan armadanya sehingga dapat bersaing secara sehat dan ekonomis dengan moda transportasi pribadi.

Sedangkan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Baiknya kerjasama antar stakeholder di sektor perhubungan untuk meningkatkan upaya pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi umum;
2. Tersedianya program subsidi transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi terutama di wilayah terpencil dan terisolir.

Tabel. 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
terhadap Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
dan Renstra Kementerian Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan	Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara 2016-2021	Sasaran pada Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019
-1	-2	-3	-4	-5
1	Persentase Desa tertinggal yang memiliki prasarana transportasi		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia
2	Persentase Kecamatan perbatasan yang memiliki prasarana transportasi		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
				Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia
3	Persentase Perda dan Perbub yang mendukung pelayanan transportasi perairan		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
				Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Menurunnya angka kecelakaan transportasi

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan	Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara 2016-2021	Sasaran pada Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019
-1	-2	-3	-4	-5
5	Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia
6	Persentase Pemasangan Rambu		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Menurunnya angka kecelakaan transportasi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033 dan KLHS Kabupaten Nunukan, terdapat faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW, antara lain :

1. Bahwa kondisi eksisting dari prasarana perhubungan maupun perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan telah selaras dengan RTRW Kabupaten Nunukan;
2. Dengan hal pada poin nomor 1 tersebut diatas, pembangunan infrastruktur perhubungan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat berlangsung dengan baik tanpa resiko pembatalan atau penundaan karena bertentangan dengan RTRW Kabupaten Nunukan.

Tabel. 3.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	PKSN Nunukan di Kecamatan Nunukan	telah ada	-	-	
2	PKSN Simanggaris di Kecamatan Simanggaris	telah ada	-	-	
3	PKSN Long Midang di Kecamatan Krayan	telah ada	-	-	
4	PKW kawasan perkotaan Nunukan di Kecamatan Nunukan	telah ada	-	-	
5	PKW wilayah Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong	telah ada	-	-	
6	PKWp Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur	telah ada	-	-	
7	PKWp Long Bawan di Kecamatan Krayan	telah ada	-	-	
8	PKWp Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan	telah ada	-	-	
9	PKL Perkotaan Mensalong di Kecamatan Lumbis	telah ada	-	-	
10	PKL Perkotaan Pembeliangan di Kecamatan Sebuku	telah ada	-	-	
11	PKL Perkotaan Atap di Kecamatan Sembakung	telah ada	-	-	

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
12	PKL Srinanti di Kecamatan Simanggaris	telah ada	-	-	
13	Pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Simanggaris	belum terlaksana	Penyediaan lahan	Penyediaan lahan sesuai kebutuhan, perencanaan	Seimenggaris
14	Pembangunan terminal penumpang Tipe B berada di Long Midang Kecamatan Krayan dan Mansalong Kecamatan Lumbis	belum terlaksana	Penyediaan lahan	Penyediaan lahan sesuai kebutuhan, perencanaan	Long Midang dan Mansalong
15	Pembangunan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Nunukan Selatan, Sebuku, Sembakung, dan Kecamatan Sebatik	belum terlaksana	Penyediaan lahan	Penyediaan lahan sesuai kebutuhan, perencanaan	Nunukan Selatan, Sebuku, Sembakung dan Sebatik
16	Optimalisasi terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Nunukan dan di Bambang Kecamatan Sebatik Barat	belum terlaksana	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal	Optimalisasi terminal terutama untuk pemenuhan kebutuhan operasionalisasi terminal	Nunukan dan Bambang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
17	Pengembangan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh kecamatan	sedang dilaksanakan	Kegiatan Pengadaan PJU	Pengadaan PJU	Seluruh kecamatan
18	Pengembangan perlengkapan jalan berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jaringan jalan di perkotaan dan jaringan jalan strategis kabupaten	sedang dilaksanakan	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan perlengkapan jalan	
19	Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan Nunukan	sedang dilaksanakan	Kegiatan Pengelolaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor		Nunukan
20	Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor di Pulau Sebatik dan di wilayah daratan Pulau Kalimantan	belum terlaksana		Penyediaan lahan sesuai kebutuhan, perencanaan	Sebatik dan Sebuku
21	Angkutan penumpang Pulau Nunukan (dalam Kota Nunukan, Sedadap-Mamolo, dan Sei Fatimah-Binusan)	sedang dilaksanakan	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Nunukan		
22	Angkutan penumpang dalam Pulau Sebatik	sedang dilaksanakan			

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
23	Angkutan penumpang di wilayah daratan Pulau Kalimantan (Sei Ular-Simanggaris-Sebuku-Sembakung-Lumbis dan Mansalong-Malinau)	sedang dilaksanakan			
24	Angkutan umum perdesaan (Pembeliangan-Atap, Pembeliangan-Sanur- Makmur-Sekikilan dan Pembeliangan-Mansalong)	sedang dilaksanakan			
25	Penataan jaringan trayek transportasi sungai dan penyeberangan Nunukan-Sebatik, Nunukan-Simanggaris, Nunukan-Sungai Ular, Mansalong-Binter - Tau Lumbis, Mansalong-Tarakan, Nunukan - Pembeliangan, Nunukan- Atap	sedang dilaksanakan	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk kepelabuhanan Dan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Di Perairan		

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
26	Peningkatan dermaga-dermaga di Nunukan, Sebuku, Sei Ular, Simanggaris, Sembakung, Mansalong, Binter, dan Tau Lumbis	sedang dilaksanakan	Kegiatan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan dan Dermaga Sungai		Nunukan, Sebuku, Sei Ular, Simanggaris, Sembakung, Mansalong, Binter, dan Tau Lumbis
27	Penyediaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sungai dan sarana pengawasan keselamatan lainnya	sedang dilaksanakan	Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai		Sebuku dan Seimenggaris
28	Optimalisasi pelabuhan dan pelayaran lintas penyeberangan Nunukan-Tarakan	sedang dilaksanakan			
29	Pembangunan angkutan penyeberangan lintas penyeberangan Nunukan-Sebatik, Nunukan-Simanggaris dan Sebatik-Simanggaris	sedang dilaksanakan	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Liang Bunyu (Sebatik) dan Seimenggaris		

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
30	Pembangunan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi : Provinsi Kalimantan Selatan – Kuaro – Long kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga - Samarinda – Bontang – Sangata – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Tanah Kuning – Tanjung Selor – Kerang Agung – Sesayap – Tidung Pale – Nunukan Kota – Mensalong – Pembeliangan – Salang – Simanggaris – Batas Negara	belum terlaksana		-	Mansalong - Pembeliangan - Salang - Seimenggaris - Batas Negara
31	Pembangunan stasiun kelas kecil yang direncanakan di Mensalong dan Simanggaris	belum terlaksana			Mansalong dan Seimanggaris
32	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Skala Tersier Tunon Taka berada di Kecamatan Nunukan	sedang dilaksanakan			

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
33	Pengembangan pelabuhan Pengumpul Skala Tersier Sungai Nyamuk berada di Kecamatan Sebatik Timur	sedang dilaksanakan			
34	Pengembangan dan operasionalisasi Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Jung dan Sungai Pancang	sedang dilaksanakan	Kegiatan Pengelolaan PLBL Liem Hie Jung		
35	Optimalisasi alur pelayaran : Nunukan-Sebatik, Nunukan-Tarakan, Nunukan-Balikpapan, Nunukan-Makassar, Nunukan-Pantoloan, Nunukan-Pare-Pare, Nunukan-Toli-Toli, Nunukan-Bau-Bau, Nunukan-Surabaya, Nunukan-NTT, Nunukan-Tawau (Malaysia)	sedang dilaksanakan			
36	Pengembangan alur pelayaran nasional dan internasional : Nunukan-Bitung, Nunukan-Sandakan (Malaysia), Nunukan-Filipina Selatan	belum terlaksana		-	Nunukan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
37	Bandara pengumpul skala tersier : Bandara Nunukan di Kecamatan Nunukan	telah ada			
38	Bandara pengumpan : Bandara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan dan Bandara Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan	telah ada			
39	Bandara khusus perbatasan darat : Bandara khusus Tau Lumbis (Lumbis Ogong), Bandara khusus Binuang (Krayan Selatan), Bandara khusus Kampung Baru (Krayan), Bandara khusus Kurid (Krayan), Bandara khusus Lembudud (Krayan), Bandara khusus Berian Baru (Krayan), Bandara khusus Pa' Upan (Krayan), Bandara khusus Buduk Kubul (Krayan), Bandara khusus Long Rungan (Krayan Selatan), Bandara khusus Mansalong (Lumbis)	telah ada			
40	Bandara penanganan bencana : Bandara Nunukan	telah ada			

Tabel. 3.5

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	<p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan pertahanan dan keamanan - Kawasan pemeriksaan dan pelayanan pertahanan keamanan - Pos-pos pemeriksaan bea cukai, imigrasi dan karantina kesehatan pada titik-titik perbatasan, pelabuhan dan bandara 	sedang dipenuhi	-	Pengembangan bandara dan pelabuhan/dermaga di titik perbatasan	Kecamatan perbatasan negara yang mempunyai akses jalan darat, sungai dan laut

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021;
- d. Implikasi RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033 bagi pelayanan Dinas Perhubungan; dan

Dan digunakannya metoda penentuan isu-isu strategis menggunakan metode scoring dengan pembobotan kriteria sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016-2021 sebagai berikut :

1. Belum cukupnya dan meratanya kualitas SDM sektor transportasi yang berpengaruh pada performa sektor transportasi secara keseluruhan;
2. Belum tersedianya infrastruktur transportasi yang baik diseluruh wilayah kabupaten terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal;
3. Belum tertatanya secara baik pengoperasian moda transportasi darat dan perairan yang disebabkan terbatasnya peraturan dan rendahnya kualitas SDM;
4. Semakin rendahnya jumlah pengguna transportasi umum terutama angkutan darat karena meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan buruknya kualitas pelayanan angkutan darat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

4.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang merupakan penjabaran dari pernyataan Visi, yang mempunyai sifat idealistik dan jangkauan waktu jauh ke depan dan bersifat abstrak.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tersebut telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- **“Meningkatkan konektivitas dan sistem layanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal”.**

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis realistis, rasional dan komprehensif berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah :

- 1. Meningkatnya prasarana transportasi yang melayani wilayah perbatasan dan daerah tertinggal;**
- 2. Meningkatnya sistem layanan transportasi yang berkualitas.**

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan konektivitas dan sistem layanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Meningkatnya prasarana transportasi yang melayani wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Persentase Desa tertinggal yang memiliki prasarana transportasi	7,43%	8,00%	9,71%	12,00 %	14,29 %
			Persentase Kecamatan perbatasan yang memiliki prasarana transportasi	40,00 %	40,00 %	40,00 %	53,33 %	66,67 %
		Meningkatnya sistem layanan transportasi yang berkualitas	Persentase Perda dan Perbub yang mendukung pelayanan transportasi	34,05 %	42,43 %	53,95 %	76,97 %	100,00 %
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	80,65 %	81,85 %	83,05 %	84,25 %	85,45 %
			Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum	0,0007	0,0007	0,0007	0,0014	0,0024
			Persentase Pemasangan Rambu	79,00 %	79,00 %	84,00 %	89,00 %	100,00 %

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

5.1.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah :

1. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkualitas, merata dan terintegrasi secara berkelanjutan;
2. Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas, terjangkau, mudah diakses, aman dan nyaman.

5.1.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/ tindakan yg diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah :

1. Mempercepat penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan prasarana transportasi yang handal dalam upaya memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang/ jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan keandalan dalam rangka menjamin kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI (RPJMD) : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera.			
MISI I (RPJMD) : Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan konektivitas dan sistem layanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Meningkatnya prasarana transportasi yang melayani wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkualitas, merata dan terintegrasi secara berkelanjutan	Mempercepat penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan prasarana transportasi yang handal dalam upaya memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang/ jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis
	Meningkatnya sistem layanan transportasi yang berkualitas	Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas, terjangkau, mudah diakses, aman dan nyaman	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan keandalan dalam rangka menjamin kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini, akan disampaikan rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator Kinerja Program (Outcome), Indikator Kinerja Kegiatan (Output), Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan tersebut serta Pendanaan Indikatif per tahunnya sampai dengan akhir periode RPJMD (tabel terlampir).

Adapun Program dan Kegiatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan pelabuhan laut dan sungai;
- 2) Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Laut;
- 3) Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Sungai;
- 4) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Laut;
- 5) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Sungai;
- 6) Kegiatan perencanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengembangan terminal dan halte;
- 7) Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Terminal dan Halte;
- 8) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal dan Halte.

2. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sebatik (Liang Bunyu);
- 4) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Seimenggaris;
- 5) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebatik;
- 6) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebuku dan Sembakung;

- 7) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Transportasi Darat;
- 8) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Transportasi Perairan;
- 9) Kegiatan pengadaan sarana angkutan darat;
- 10) Kegiatan pengadaan sarana angkutan perairan.

3. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan;
- 2) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- 3) Kegiatan Pengadaan PJU;
- 4) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan PJU;
- 5) Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai;
- 6) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai;
- 7) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya;
- 8) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 9) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan di Perairan;
- 10) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Perairan;
- 11) Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Perairan;
- 12) Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Darat.

4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 7) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
- 8) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
- 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran;
- 10)Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 11)Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

8. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Program Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan.

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan.

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021

NO	Indikator Kabupaten/Indikator Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun (2015/2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah							
1	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	14,86	16,57	17,14	20,00	22,86	25,71	25,71
2	Persentase Desa tertinggal yang memiliki prasarana transportasi	5,71	7,43	8,00	9,71	12,00	14,29	14,29
3	Persentase Kecamatan perbatasan yang memiliki prasarana transportasi	NA	40,00	40,00	40,00	53,33	66,67	66,67
4	Persentase Perda dan Perbub yang mendukung pelayanan transportasi	30,92	34,05	42,43	53,95	76,97	100,00	100,00
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	80,65	80,65	81,85	83,05	84,25	85,45	85,45
6	Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum	NA	0,0007	0,0007	0,0007	0,0014	0,0024	0,0024
7	Persentase Pemasangan Rambu	65,00	79,00	79,00	84,00	89,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik diintern Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021 dengan Tujuan **“Meningkatkan konektivitas dan sistem layanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal”** ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
			Jumlah	Satuan	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	14	01	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Pelabuhan Laut dan Sungai/Terminal yang ditangani	80,00	%	80,00	6.390.250	80,00	880.000						80,00	7.270.250	Kepala Bidang Prasarana Perhubungan	Kab. Nunukan	
				Persentase Prasarana perhubungan perairan yang dibangun dan ditingkatkan	60,71	%					85,71	3.262.000	92,86	500.003	100,00	575.004	100,00			4.337.007
				Persentase Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab/dipelihara	NA	%					28,57		64,29		100,00		100,00			
				Persentase Prasarana perhubungan darat yang dibangun dan ditingkatkan	73,68	%					73,68		84,21		100,00		100,00			
				Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang direhab/dipelihara	NA	%					41,67		75,00		100,00		100,00			
			1	Kegiatan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan pelabuhan laut dan sungai	NA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	100.000	0	0	1	100.000	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	
			2	Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Laut	4	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	
			3	Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Sungai	13	Unit	3	6.176.000	1	830.000	3	3.160.000	2	1	1	1	10	3.160.002	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	
			4	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Laut	NA	Unit	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	
			5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Sungai	NA	Unit	2	119.250	0	0	2	102.000	5	250.000	5	250.000	14	602.000	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
			Jumlah	Satuan	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	"(15)	(16)	(17)	(18)	"(19)	(20)	(21)		
		6	Kegiatan perencanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengembangan terminal / halte	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengembangan terminal / halte yang disusun	NA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan	
		7	Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Terminal / Halte	Jumlah Terminal / Halte yang dibangun / dikembangkan	14	Unit	0	0	0	0	0	0	2	150.000	3	225.000	5	375.000	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan	
		8	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Halte	Jumlah Terminal dan Halte yang direhab/ dipelihara	NA	Unit	0	0	0	0	0	0	4	100.000	3	100.000	7	200.000	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan	
		9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	NA	%	100	95.000	100	50.000	-	-	-	-	-	-	100	145.000	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan	
1	14	02	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Persentase angkutan darat	0,065	%	0,065	470.973	0,065	382.796							0,065	853.768	Kepala Bidang Perhubungan Darat	Kab. Nunukan
				Persentase arus penumpang angkutan perairan	NA	%					90,70	384.529	95	439.912	100,00	457.509	100,00	1.281.950	Kepala Bidang Perhubungan Perairan	
				Persentase arus penumpang angkutan Darat	NA	%					90,70		95,24		100,00		100,00		Kepala Bidang Perhubungan Darat	
		1	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung	Pengelolaan UPT. PLBL Liem Hie Djung (100%)	100	%	100	179.527	100	200.150								379.677	Kepala UPT. PLBL Liem Hie Djung	
				Jumlah arus penumpang angkutan perairan	NA	Orang					241347	196.760	253414	204.630	266085	212.815	266085	614.205		
		2	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun	Pengelolaan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Sei. Jepun (100%)	100	%	100	44.378	100	23.132								67.509	Kepala UPT. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun	
				Jumlah arus penumpang angkutan perairan	NA	Orang					87780	38.411	92169	39.947	96777	41.545	96777	119.904		
		3	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sebatik (Liang Bunyu)	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sebatik Lian Bunyu (Liang Bunyu) (100%)	100	%	100	205.655	100	32.484								238.139	Kepala UPT. Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebatik	
				Jumlah arus penumpang angkutan perairan	NA	Orang					3066	79.154	3219	82.320	3380	85.613	3380	247.087		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	4	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Seimenggaris	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Seimenggaris (100%)	100	%			100	7.160						100	7.160	Kasi Kepelabuhanan dan Pengkespel		
			Jumlah arus penumpang angkutan perairan	NA	Orang							39227	20.000	41188	20.800	41188	40.800		
	5	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebatik	Pengelolaan UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebatik (100%)	100	%	100	27.753	100	45.566						100	73.320	Kepala UPT. Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebatik		
			Jumlah arus penumpang angkutan perairan dan angkutan darat	NA	Orang					135631	34.916	142413	36.313	149533	37.766	149533	108.995		
	6	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebuku dan Sembakung	Pengelolaan UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebuku dan Sembakung (100%)	100	%			100	25.299						100	25.299	Kepala UPT. Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebuku dan Sembakung		
			Jumlah arus penumpang angkutan perairan dan angkutan darat	NA	Orang					56883	16.208	59727	16.856	62714	17.531	62714	50.595		
	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Transportasi Darat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha jasa transportasi darat yang dilaksanakan	NA	Kegiatan					3	19.080	3	19.843	3	20.637	3	59.560	Kasi Keselamatan LLAJ	
	8	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Transportasi Perairan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha jasa transportasi perairan yang dilaksanakan	NA	Kegiatan							2	20.000	2	20.800	2	40.800	Kasi Angkutan Perairan	
	9	Kegiatan pengadaan sarana angkutan darat	Jumlah sarana angkutan darat yang diadakan	NA	Unit							1	1	1	1	2	2	Kasi Pengendalian dan Operasional LLAJ	
	10	Kegiatan pengadaan sarana angkutan perairan	Jumlah sarana angkutan perairan yang diadakan	NA	Unit							1	1	1	1	2	2	Kasi Angkutan Perairan	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
			Jumlah	Satuan	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			target	Rp. (000)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
		11	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Darat Bersubsidi	Penyelenggaraan angkutan Darat bersubsidi (100%)	NA	%	100	3.200	100	27.125							100	30.325	Kasi Pengendalian dan Operasional LLAJ		
		12	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Perairan Bersubsidi	Penyelenggaraan angkutan perairan bersubsidi (100%)	NA	%	100	6.510	100	21.880							100	28.390	Kasi Angkutan Perairan		
		13	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bersubsidi	Penyelenggaraan angkutan udara bersubsidi(100%)	NA	%	100	3.950									100	3.950	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan		
1	14	03	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio ijin trayek	0,0054	Unit	0,0054	1.434.605	0,0054	1.393.722							0,0054	2.828.327	Kepala Bidang Perhubungan Darat	Kab. Nunukan	
				Persentase Pemasangan Rambu-rambu	65,00	%	65,00		65,00									65,00		Kepala Bidang Prasarana Perhubungan	
				Persentase Pemasangan Faskes perhubungan darat	NA	%				33,33	2.288.210	66,67	2.579.741	100,00	2.674.930	100,00	7.542.881		Kepala Bidang Prasarana Perhubungan		
				Persentase Pemasangan Faskes perhubungan perairan	87,80	%				87,80		93,90		100,00		100,00			Kepala Bidang Prasarana Perhubungan		
				Rasio ijin trayek angkutan darat	NA	Unit				0,0008		0,0016		0,0026		0,0026			Kepala Bidang Perhubungan Darat		
				Persentase Layanan Angkutan darat	NA	%				2,479		2,361		2,248		2,248			Kepala Bidang Perhubungan Darat		
				Rasio ijin trayek angkutan perairan	NA	Unit				0,0007		0,0013		0,0022		0,0022			Kepala Bidang Perhubungan Perairan		
				Persentase Layanan Angkutan perairan	NA	%				0,047		0,045		0,043		0,043			Kepala Bidang Perhubungan Perairan		
				Persentase Perda dan Perhub Bidang Perairan	25,00	%				50,00		75,00		100,00		100,00			Kepala Bidang Perhubungan Perairan		
				Persentase Perda dan Perhub Bidang Darat	36,84	%				57,89		78,95		100,00		100,00			Kepala Bidang Perhubungan Darat		
		1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan	NA	Paket			2	13.923						2	13.923	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan			
				Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan	NA	Jenis				2	150.000	2	156.000	2	162.240	6	468.240				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
			Jumlah	Satuan	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	2	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Perlekapan Jalan yang direhab	100	%	100	179.716	100	186.430							100	366.146	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan	
			Jumlah perlekapan jalan yang direhab / dipelihara	NA	Jenis					2	134.733	2	140.122	3	145.727	7	420.582		
	3	Kegiatan Pengadaan PJU	Jumlah PJU yang diadakan	NA	Unit							1	1	1	1	2	2	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	
	4	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan PJU	Jumlah PJU yang dipelihara	100	%	100	1.319.575	100	1.257.480							100	2.577.055	Kasi Prasarana Perhubungan Perairan	
			Jumlah PJU yang direhabilitasi / dipelihara	NA	Unit					80	1.824.800	162	1.897.792	162	1.973.704	404	5.696.296		
	5	Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai	Jumlah rambu lalu lintas angkutan sungai yang diadakan	73	Unit							5	100.000	5	100.000	10	200.000	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan	
	6	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai	Jumlah rambu lalu lintas angkutan sungai yang direhab /dipelihara	NA	Unit							30	100.000	30	100.000	60	200.000	Kasi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan	
	7	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	NA	Kali			3	20.300	3	58.050	3	60.372	3	62.787	3	181.209	Kasi Pengendalian dan Operasional LLAJ	
	8	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang disusun	NA	Dokumen							1	1	1	1	2	2	Kasi Pengendalian dan Operasional LLAJ	
	9	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Perairan	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di perairan	NA	Kali			2	61.400	3	120.625	3	125.450	3	130.468	3	376.543	Kasi Kepelabuhanan dan Pengkospel	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	10	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Perairan	Jumlah dokumen rencana induk jaringan lalu lintas angkutan perairan yang disusun	NA	Dokumen						1	1			1		1	Kasi Angkutan Perairan		
	11	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Perairan	Jumlah draft peraturan perundangan bidang perairan yang disusun	4	Dokumen				2	1	4	1	4	1	10		3	Kasi Angkutan Perairan & Kasi Kepelabuhanan dan Penkespel		
	12	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Darat	Jumlah draft peraturan perundangan bidang perhubungan darat yang disusun	7	Dokumen				2	1	4	1	4	1	10		3	Kasi Pengendalian dan Operasional LLAJ & Kasi Keselamatan LLAJ		
1	14	04	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	80,65	%	80,65	115.030	81,85	54.542	83,05		84,25		85,45		85,45	169.572	Kepala Bidang Perhubungan Darat	Kab. Nunukan
				Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	55	Menit	55		53		50	59.670	48	107.057	45	111.339	45	278.066		
				Jumlah uji kir angkutan umum	744	Unit	744		751											
				Prosentase Penerimaan Retribusi Uji KIR angkutan umum	91,54	%	91,54		92,47											
	1		Kegiatan Pengelolaan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengelolaan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	100	%	100	115.030	100	54.542							100	169.572	Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	
	2		Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Angkutan Umum yang dilakukan Uji KIR	744	Unit					758	59.670	765	62.057	772	64.539	772	186.266		
	3		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	NA	Jenis							3	45.000	4	46.800	7	91.800	Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya	NA	%			60,00	47.960			63,33	50.000	66,67	52.000	66,67	149.960	Sekretaris	Kab. Nunukan	
			1	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek	NA	%			60	47.960						60	47.960	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kab. Nunukan	
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis perhubungan	NA	Orang						2	50.000	2	52.000	4	102.000	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Kab. Nunukan	
1	14	06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase efisiensi penyerapan anggaran	100	%	100	4.225.828	100	4.909.615							100	9.135.443	Sekretaris	Kab. Nunukan	
				Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100	%					100	5.720.622	100	5.949.446	100	6.187.424	100	17.857.492	Sekretaris		
			1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	%	100	176.695	100	202.370						100	379.065	Kasubbag. Umum & Kepegawaian		
					Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Jenis					4	219.220	4	227.989	4	237.108	4	684.317		
			2	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	100	%	100	33.181	100	24.580						100	57.761	Kasubbag. Umum & Kepegawaian		
					Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	20	Jenis					20	35.000	20	36.400	20	37.856	20	109.256		
			3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100	%	100	83.194	100	63.500						100	146.694	Kasubbag. Umum & Kepegawaian		
					Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	10	Jenis					10	55.123	10	57.327	10	59.620	10	172.070		
			4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	%	100	126.898	100	162.360						100	289.258	Kasubbag. Umum & Kepegawaian		
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11	Jenis					11	47.240	11	49.129	11	51.094	11	147.463		
			5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	%	100	17.981	100	6.224						100	24.205	Kasubbag. Umum & Kepegawaian		
					Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	Jenis					5	13.793	5	14.344	5	14.918	5	43.055		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	6	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100	%	100	5.760	100	10.013							100	15.773	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4	Jenis					4	14.982	4	15.581	4	16.205	4	46.768		
	7	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100	%	100	166.775	100	138.800							100	305.575	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
			Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10	OH					10	100.000	10	104.000	10	108.160	10	312.160		
	8	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	NA	OH					20	35.380	20	36.795	20	38.267	20	110.442	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	Jumlah pembayaran Jasa Umum Perkantoran yang disediakan	100	%	100	3.577.675	100	4.136.080							100	7.713.755	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
			Jumlah jasa umum perkantoran yang disediakan	294	Orang					294	5.111.700	294	5.316.168	294	5.528.815	294	15.956.683		
	10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	%	100	129.875	100	129.875							100	129.875	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Jenis					12	47.185	12	49.072	12	51.035	12	147.293		
	11	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	100	%	100	34.789	100	32.214							100	67.003	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4	Jenis					4	41.000	4	42.640	4	44.346	4	127.986		
	12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	100	%	100	2.880	100	3.600							100	6.480	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
1	14	07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	100	%	100	109.631	100	101.207						100	210.838	Sekretaris	Kab. Nunukan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai	100	%					100	139.000	100	196.560	100	326.142	100	661.702	Sekretaris	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	100	%	100	109.631	100	101.207						100	210.838	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	5	Jenis					5	115.000	5	119.600	5	124.384	5	358.984		
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Gedung				1	24.000	1	24.960	1	25.958	1	74.918	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
	3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	NA	Stell						80	52.000	293	175.800	373	227.800	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
1	14	08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	100	%	100	50.924	-	0	-	0	-	0	100	50.924	Sekretaris	
	1		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam dinas sesuai aturan	100	%	100	50.924							100	50.924	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	
1	14	09	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan dokumen keuangan	100	%	100	223.388	100	65.560	100	174.586			100	463.534	Sekretaris	Kab. Nunukan
	1		Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Peringkat Daerah	Penyelenggaraan Manajemen Pengelolaan Keuangan SKPD	100	%	100	223.388	100	65.560					100	288.948	Kasubbag. Keuangan	
			Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	3	Dokumen				3	174.586				3	174.586			
1	14	10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya penyusunan dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA SKPD)	100	%			100	25.000					100	25.000	Sekretaris	Kab. Nunukan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1 Kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA SKPD)	6	Dokumen			6	25.000							6	25.000	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan		
1	14	11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Sakip	NA	Nilai				B	44.978				B	44.978	Sekretaris	Kab. Nunukan	
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4	Dokumen			4	24.988					4	24.988	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan		
		2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan realisasi kegiatan	2	Dokumen			2	19.990					2	19.990	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan		
1	14	12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	%						100	217.359	100	276.053	100	493.412	Sekretaris	Kab. Nunukan
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4	Dokumen					4	15.000	4	15.600	8	30.600	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan		
		2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan realisasi kegiatan	2	Dokumen					2	20.790	2	21.622	4	42.412	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan		
		3	Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen laporan keuangan yang disusun	3	Jenis					5	181.569	5	188.832	10	370.401	Kasubbag. Keuangan		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Jumlah	Satuan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	4 Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	1	Dokumen									1	50.000	1	50.000	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan	